ANALISIS MEKANISME PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN SPT MASA PPH UNIFIKASI ATAS JASA FREIGHT FORWARDING

Dyah Putri Ramadani F¹⁾, M Sodik^{1*)}, Untung Wahyudi¹⁾

¹⁾ Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang

INFORMASI ARTIKEL

Data Artikel:

Naskah masuk, 14 Juli 2023

Direvisi, 30 Juli 2023

Diterima, 16 Agustus 2023

*Email Korespondensi:

sodik@widyagama.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di PT. Rachmat Utama Sejahtera (Konsolidator Lion Parcel Malang) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa *freight forwarding* atau jasa *logistics*. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah mengetahui bagaimana mekanisme penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan SPT Unifikasi atas jasa *freight forwarding* pada perusahaan tersebut apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dasar pengenaan objek pemotongan PPh 23 sebesar 2 % dari jumlah bruto (Penghasilan) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 141/PMK.03/2015 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif sedangkan metode analisis yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah metode analisis ekualisasi. Data yang diperoleh menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi dan studi literatur. Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme yang di terapkan di PT. Rachmat Utama Sejahtera dari penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan SPT Unifikasi yang di lakukan telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci : SPT Masa PPh Unifikasi Pasal 23, Jasa Freight Forwarding

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka pembangunan ekonomi di Negara Indonesia tidak terlepas dari kebijakan dibidang perpajakan. Di Indonesia terdapat begitu banyak jenis pajak yang tentu saja hal ini dapat menambah pendapatan negara untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik dan pembangunan nasional. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Sebagaimana terdapat begitu banyaknya jenis pajak di Indonesia, salah satu jenis pajak yang paling potensial adalah Pajak Penghasilan (PPh) Salah satu pajak penghasilan tersebut adalah PPh Pasal 23 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 21. Indonesia menerapkan beberapa jenis prinsip pemungutan pajak yaitu yang pertama adalah Self Assessment System. Self Assessment System merupakan salah satu sistem pemungutan pajak dimana sistem ini membebaskan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Salah satu pajak penghasilan tersebut adalah PPh Pasal 23 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 21. Jasa *Freight Forwarding* atau jasa

pengurusan transportasi adalah usaha yang ditunjukkan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan 3 barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara yang mencakup kegiatan pengiriman, penerimaan, bongkar muat, penyimpanan, sortasi, pengepakan, pemesanan ruangan pengangkutan, pengelolaan pendistribusian, perhitungan biaya angkutan, serta layanan logistik.

Jasa *Freight Forwarding* atau jasa pengurusan transportasi adalah usaha yang ditunjukkan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan 3 barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara yang mencakup kegiatan pengiriman, penerimaan, bongkar muat, penyimpanan, sortasi, pengepakan, pemesanan ruangan pengangkutan, pengelolaan pendistribusian, perhitungan biaya angkutan, serta layanan logistik.

Jasa *Freight Forwarding* atau dikenal dengan istilah jasa pengurusan transportasi atau disingkat JPT bertujuan untuk mempercepat proses transportasi sehingga barang dapat terkirim dengan waktu yang diinginkan dan kondisi barang aman dan tidak rusak. Kegiatan jasa *Freight Forwarding* ini merupakan kegiatan usaha yang memberikan pelayanan mulai dari penerimaan barang, penyimpanan barang, penimbangan barang, pengepakan barang, penandaan barang, pengukuran barang, sortasi barang, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan transportasi luar negeri. Salah satu contoh perusahaan yang bergerak dalam jasa *freight forwarding* adalah PT. Rachmat Utama Sejahtera yang bergerak dalam bidang jasa kurir ekspres dan *logistics* yang berpusat di Jakarta. PT. Rachmat Utama Sejahtera adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang ekspedisi pengiriman barang. PT Rachmat Utama Sejahtera ini merupakan sebuah cabang dari PT. Lion Express yang mengcover wilayah Malang Raya. PT. Rachmat Utama Sejahtera bertugas melayani pengurusan dokumen dan muatan yang akan diangkut atau pengurusan dokumen dan muatan dan bertugas untuk mengurus barang dari pemilik barang yang secara tertulis telah mendapat kuasa dari pemilik barang. Sebagai perusahaan yang juga taat akan pajak, maka PT. Rachmat Utama Sejahtera berkewajiban untuk melakukan penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang mengacu pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, dalam hal ini khususnya PPh Pasal 23 atas penggunaan jasa *Freight Forwarding* pada PT. Rachmat Utama Sejahtera (Konsolidator Lion Parcel Malang).

Besarnya tarif perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa *Freight Forwarding* atau jasa pengiriman *logistics* adalah 2% sesuai dengan ketentuan penghitungan nomor 1 kantor pusat PT. Rachmat Utama Sejahtera.

Tabel 1.1

Penghitungan PPh Pasal 23 atas jasa *Freight Forwarding* atau jasa *logistics* pada PT. Rachmat Utama Sejahtera (Konsolidator Lion Parcel Malang)

Periode Tahun 2022

No	Tahun Pajak	Jumlah Komisi yang terkena PPh Pasal 23	Tarif	Besarnya jumlah PPh Pasal 23 yang di potong
1	Tahun 2022	Rp. 145.157.040	2%	Rp. 2.903.141

Sumber : PT. Rachmat Utama Sejahtera (Konsolidator Lionparcel) Cabang Malang

Dari tabel 1.1 diketahui bahwa pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 periode Tahun 2022. Pada tahun 2022 pendapatan dari penjualan atas jasa pengiriman pada tahun 2022 sebesar Rp. 145.157.040, dan total pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp. 2.903.141. Kewajiban pembayaran PPh Pasal 23 atas jasa telah lama berlaku di Indonesia, tetapi bagi perusahaan-perusahaan yang dikategorikan menengah kecil atau bagi orang yang awam akan adanya pajak, sering tidak mengetahui adanya pemotongan PPh atas jasa yang telah mereka keluarkan. Pihak penyedia jasa service merasa dirugikan dan tidak terima akan adanya

pemotongan pajak penghasilan dengan melakukan komplain kepada PT. Rachmat Utama Sejahtera (Konsolidator Lion Parcel Malang) karena nominal yang diterima pihak penyedia jasa service tidak sesuai dengan yang diperkirakan, sedangkan pemotongan pajak atas penghasilan yang telah mereka terima harus tetap terjadi.

a) RUMUSAN MASALAH

Bagaimana mekanisme penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan SPT Unifikasi Atas Jasa *Freight Forwarding* pada PT. Rachmat Utama Sejahtera (Konsolidator Lion Parcel Malang) apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?

b) TUJUAN PENELITIAN

Bagaimana mekanisme penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan SPT Unifikasi Atas Jasa *Freight Forwarding* pada PT. Rachmat Utama Sejahtera (Konsolidator Lion Parcel Malang) apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?

c) MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan guna memberikan masukan bagi perusahaan dalam melaksanakan peraturan perpajakan dengan benar sehingga dapat mencegah perusahaan dari kerugian akibat beban pajak yang seharusnya bisa dihindari.

2) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi wawasan bagi peneliti mengenai SPT Unifikasi, mengetahui prosedur penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan SPT Unifikasi pada perusahaan yang diteliti dan di harapkan peneliti mampu mengaplikasikan pengetahuan peneliti di bidang perpajakan yang selama ini diperoleh pada saat perkuliahan.

3) Bagi Universitas Widyagama Malang

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan terutama dibidang Akuntansi Perpajakan khususnya mengenai mekanisme penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan SPT Unifikasi dan dapat dijadikan motivasi bagi mahasiswa dalam penelitian berikutnya.

4) Bagi Peneliti Selanjut

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi atau pengetahuan yang bermanfaat memberikan dasar pemikiran yang berkaitan dengan sektor perpajakan terutama Akuntansi Perpajakan dengan tema SPT Unifikasi.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini dititikberatkan pada mekanisme penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwarding* berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku tahun 2022. Data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Gambaran Umum Perusahaan dari PT. Rachmat Utama Sejahtera
2. Struktur Organisasi Perusahaan dari PT. Rachmat Utama Sejahtera
3. Nilai Objek Pajak atas Jasa *Freight Forwarding* dari PT. Rachmat Utama Sejahtera
4. Penghitungan PPh Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwarding* dari PT. Rachmat Utama Sejahtera

5. Bukti Potong PPh Pasal 23 Tahun 2022

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis ekualisasi untuk menganalisis apakah SPT Masa PPh Unifikasi Pasal 23 di perusahaan tersebut sudah benar menggunakan undang-undang yang berlaku saat itu. Sehubungan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian yaitu bagaimana penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi pasal 23 atas Jasa Penghasilan *Freight Forwarding* pada PT. Rachmat Utama Sejahtera sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mewajibkan setiap perusahaan sebagai wajib pajak untuk melakukan pemotongan PPh 23 dari salah satu jenis jasa lain tersebut yaitu jasa *freight forwarding* yang dapat dirumuskan sebagai berikut : “Nilai Bruto x besarnya tarif pajak penghasilan”

Dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a) Untuk perusahaan yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) maka tarifnya adalah 2%.
- b) Untuk perusahaan yang tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) maka tarifnya adalah 100%. Nilai bruto (Jumlah pembayaran yang diterima diluar PPh) atas kegiatan jasa *freight forwarding* dikalikan dengan tarif pajak penghasilan dan tidak termasuk penggantian biaya (*reimbursement*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai Analisis SPT Unifikasi atas jasa *Freight Forwarding* pada PT Rachmat Utama Sejahtera (Konsolidator Lion Parcel Malang) dengan tarif sebesar 2% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan PMK No. 141/PMK.03/2015 sebagai berikut :

a) Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

PT. Rachmat Utama Sejahtera melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 23 dengan tarif sesuai dengan PMK No.141/PMK.03/2015 yaitu dengan tarif sebesar 2% dan 4%. Sesuai peraturan menteri keuangan No.24/PMK.03/2008, tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksudkan pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, kemudian di ubah terakhir kali dengan UU No. 7 Tahun 2021, PMK No.141/PMK.03/2015, dipotong pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa lain-lain pada PT. Rachmat Utama Sejahtera dapat dihitung berdasarkan dua tarif. Jika wajib pajak memiliki NPWP, maka besarnya tarif yang dikenakan adalah sebesar 2% dari Dasar Pemotongan Pajak. Dalam hal wajib pajak yang menerima penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah sebesar 4% (lebih tinggi 100%). Sesuai peraturan menteri keuangan No. 24/PMK.03/2008, tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008, kemudian di ubah terakhir kali dengan UU No. 7 Tahun 2021, yaitu imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong pajak penghasilan, dipotong pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Adapun jenis jasa yang digunakan oleh PT. Rachmat Utama Sejahtera, sehubungan dengan penggunaan harta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK. 03. 2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, kemudian di ubah terakhir kali dengan UU No. 7 Tahun 2021 yaitu imbalan sehubungan dengan jasa selain yang telah dipotong pajak penghasilan, dipotong pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto dan termasuk dalam pajak pertambahan nilai. Dari

hasil perhitungan tersebut, maka pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. Rachmat Utama Sejahtera sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

b) Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

PT. Rachmat Utama Sejahtera melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa freight forwarding tarif 2%. Pada penghitungan dan pemotongan telah peneliti tampilkan diatas dimana besarnya pajak penghasilan pasal 23 yang , menurut perundang-undangan dengan tarif 2% Rp. 2.903.141. Dari hasil perhitungan dan pemotongan tersebut, maka pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. Rachmat Utama Sejahtera sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021.

c) Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Untuk penyetoran dilakukan apabila pada masa pajak melakukan pemberian/pemakaian jasa terhadap supplier, setelah pelaksanaan penghitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa freight forwarding kewajiban PT. Rachmat Utama Sejahtera melakukan penyetoran atas pajak penghasilan pasal 23 atas jasa freight forwarding yang terutang ke kas negara. Untuk melakukan penyetoran atas pajak penghasilan pasal 23 atas jasa freight forwarding yang terutang diperlukan sarana atau alat yaitu surat setoran pajak (SSP) yang diterbitkan dibagian departmen pajak PT. Rachmat Utama Sejahtera, surat setoran pajak (SSP) berfungsi sebagai bukti dan laporan bahwa PT. Rachmat Utama Sejahtera. Setelah dilakukan pencatatan secara manual, maka dilakukan penginputan data masukan dan data keluaran secara komputerisasi setelah sebelumnya dilakukan pengkoreksian terlebih dahulu guna mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pencatatan yang akan mengakibatkan terjadinya pemeriksaan oleh fiskus. Pemotongan PPh Pasal 23 bersifat tidak final, sehingga bisa dikreditkan terhadap PPh terutang pada SPT tahunan PPh sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-Undang PPh. Sehingga pada saat dipotong, diperlakukan sebagai uang muka dan bagi pihak yang memotong dianggap sebagai hutang.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis lain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan hasil yang dapat diambil yaitu. Menurut Kak Renata Dharma selaku admin finance pada PT. Rachmat Utama Sejahtera (Konsolidator Lion Parcel Malang) pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. Rachmat Utama Sejahtera tersebut sudah sesuai dengan perhitungan pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yaitu sebesar 2% dari jumlah bruto atau berat kotor diawal. Pernyataan tersebut dapat diambil dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang menyatakan "Penghasilan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, menyelenggarakan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkannya sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas: sewa dan penghasilan lain. Sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21". Kak Renata juga menyatakan adanya kendala yang dihadapi pada saat melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Rachmat Utama Sejahtera (Konsolidator Lion Parcel Malang), diantaranya adalah terdapat beberapa kali terjadinya kesalahan dalam proses penginputan alamat ataupun kode pos penerima barang yang mengakibatkan terjadinya penggantian resi atau struk yang baru, dan juga dapat mengakibatkan pembatalan pengiriman atau terjadinya proses retur. Retur yaitu pengembalian barang yang tidak sesuai dalam kegiatan perdagangan atau jual beli.

d) **Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Ketentuan dalam Undang-Undang PPh Pasal 23 mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan usaha selain yang telah dipotong pajak yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau Subjek Pajak dalam Negeri, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan Luar Negeri lainnya.

PPh Pasal 23 PT. Rachmat Utama Sejahtera tahun 2022 telah sesuai yang pelunasannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya SPT masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. Rachmat Utama Sejahtera (Konsolidator Lion Parcel Malang) mengenai mekanisme penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan SPT Unifikasi atas jasa *Freight Forwarding*, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

a. Mekanisme penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan SPT Unifikasi atas jasa *Freight Forwarding* atau jasa *logistics* yang dilakukan PT. Rachmat Utama Sejahtera (Konsolidator Lion Parcel Malang) menggunakan kombinasi antara sistem manual dan komputerisasi yang saling berhubungan dengan baik untuk melakukan kewajiban perpajakan dan sudah menggunakan e-bupot Unifikasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

b. Besarnya potongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *Freight Forwarding* atau jasa *logistics* sebesar 2% dari penghasilan komisi yang didapat dari jumlah penjualan yang dilakukan oleh PT. Rachmat Utama Sejahtera (Konsolidator Lion Parcel Malang)

c. Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Rachmat Utama Sejahtera (Konsolidator Lion Parcel Malang) telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atas Pajak Penghasilan Pasal 23.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. Rachmat Utama Sejahtera (Konsolidator Lion Parcel Malang) mengenai mekanisme penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan SPT Unifikasi atas jasa *Freight Forwarding*, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

a. Mekanisme penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan SPT Unifikasi atas jasa *Freight Forwarding* atau jasa *logistics* yang dilakukan PT. Rachmat Utama Sejahtera (Konsolidator Lion Parcel Malang) menggunakan kombinasi antara sistem manual dan komputerisasi yang saling berhubungan dengan baik untuk melakukan kewajiban perpajakan dan sudah menggunakan e-bupot Unifikasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

b. Besarnya potongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *Freight Forwarding* atau jasa *logistics* sebesar 2% dari penghasilan komisi yang didapat dari jumlah penjualan yang dilakukan oleh PT. Rachmat Utama Sejahtera (Konsolidator Lion Parcel Malang)

c. Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Rachmat Utama Sejahtera (Konsolidator Lion Parcel Malang) telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atas Pajak Penghasilan Pasal 23.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akerina, E., Tinangon, J. J., & Mawikere, L. M. (2017). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada PT Energy Logistic Cabang Manado . *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(Vol 12. No. (2017)).
- [2] Ardianti, P. N. H. (2022). Peningkatan Sistem Pencatatan Kelengkapan Data Mandor & Pegawai Untuk Pelaporan Pajak Dengna Sistem PPh Unifikasi di PT. Citra Exact Engineering . *Sanjaya, Komang Rio*, 1(Vol 1 No 2 (2022)).
- [3] Faisol, Y. M. (2022). *Tinjauan atas Implementasi Aplikasi E-Bupot Unifikasi oleh Wajib Pajak Instansi Pemerintah di KPP Pratama Jepara*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- [4] Febrianto, M. R. (2022). *Analisis Penerapan E-Bupot PPh Unifikasi sesuai Peraturan Direktur Jnedral Pajak nomor PER-24/PJ/2021 pada PT XYZ*.
- [5] Fitri, R. (2018). *Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Jasa Freight Forwarding pada PT. Samudera Indonesia*.
- [6] Hardaning, P. (2017). *Analisis Proses Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 23 atas Jasa Freight Forwarding pada PT. Freight Express Indonesia Cabang Surabaya*.
- [7] Komariyah, S. (2019). *Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding pada PT Meratus Indonesia Cabang Surabaya*.
- [8] Lorensia, S., & Susanty, M. (2021). Analisis terhadap Perhitungan, Pencatatan, Pemotongan, penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding pada PT X 2019. *Trisakti School of Management Repository*.
- [9] Malintang, A. M. H. (2021). Evaluasi Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelporan PPh pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding di PT Perkasa Agung Sejahtera Makassar. *Dspace Repository*, 66-74.
- [10] Nasution, S. W. (2017). *Analisis Perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding pada PT. Raja Indah Cargo Cabang Medan* .
- [11] Nisa, I. A. (2021). *Analisis Pajak Penghasilan Pasl 23 atas Jasa Freight Forwarding pada PT Mukti Samudera Abadi*.
- [12] Pratiwi, E. (2021). *Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas jasa Freight Forwarding Pada PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE express) Cabang Marelان*.
- [13] Rahma, R. (2013). *Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding Pada PT Silkargo Cabang Makassar*.
- [14] Rukayyah, A. (2021). Analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Terhadap Freight Forwarding (Studi Kasus Pada PT Cahaya Hikmah Logistik). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 7(Vol. 7 No. 1 (2021)).
- [15] Ruliana, I. H., & Suharyono, E. (2016). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding pada PT Armarda Samudera Samarinda. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, Vol 5, No 3 (2016).
- [16] Sutrisni, K. E., Mahaputra, I. N. K. A., & Dewi, L. K. S. I. (2023). Penerapan Sistem E-Bupot Unifikasi Dalam Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Serta Pengoptimalisasian Arsip Pajak . *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat (SENEMA)*, 2(Vol 2 No 1).
- [17] Wicaksono, T. (2018). *Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. Lucky Intercoco Medan*.

=== Halaman Sengaja di Kosongkan ===